

Pengaruh Politik Domestik terhadap Kebijakan Luar Negeri: Kasus Kebijakan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga (TKI PLRT) ke 19 Negara di Kawasan Timur Tengah

Nidia Masithoh

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga

ABSTRAK

Kebijakan moratorium penempatan TKI pengguna perseorangan ke 19 negara Timur Tengah berdasar adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan pada pertimbangan martabat dan harga diri bangsa diberlakukan sejak Juli 2015. Terintegrasi dengan Roadmap Nol Penempatan TKI PLRT 2017, kebijakan moratorium ini didesain berlaku permanen. Melalui kerangka berpikir kebijakan luar negeri dan analisis kebijakan luar negeri yang berfokus pada lingkungan politik domestik, penelitian ini menjelaskan faktor pendorong pemberlakuan kebijakan moratorium. Dengan menggunakan studi pustaka dan analisis data kualitatif, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian eksplanatif ini mendukung hipotesis bahwa pemberlakuan kebijakan moratorium TKI pengguna perseorangan ke 19 negara Timur Tengah dipengaruhi oleh adanya narasi nasionalis asertif dalam lingkungan politik domestik yang mempengaruhi berkembangnya persepsi elit politik terkait pengiriman TKI PLRT sebagai bentuk penurunan martabat bangsa. Kebijakan moratorium juga ditengarai dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah untuk memperluas konstituen dan mobilisasi oposisi.

Kata-Kata Kunci: *Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Moratorium, Lingkungan Politik Domestik, Persepsi Elit Politik, Perluasan Konstituen*

The policy of moratorium on the placement of migrant workers to 19 Middle East countries based on the statement of President Joko Widodo which emphasized on the consideration of dignity and self-esteem applied since July 2015. Integrated with Zero Roadmap Placement of TKI PLRT 2017, this moratorium policy is designed to be permanent. Through the foreign policy framework and foreign policy analysis focusing on the domestic political environment, this study explains the factors driving the enactment of the moratorium policy. By using literature study and qualitative data analysis, the conclusion obtained in this explanative research supports the hypothesis that the enforcement of moratorium policy of Indonesian individual migrant workers to 19 Middle Eastern countries is influenced by the assertive nationalist narrative within the domestic political environment that influences the development of political elite perceptions related to the deployment of TKI PLRT as a form of decline in the dignity of the nation. The policy of the moratorium was also influenced by the government's interest in expanding constituency and opposition mobilization.

Keywords: *Indonesian Workers (TKI), Domestic Political Environment, Elite Political Perception, Constituent Expansion*

Kebijakan penghentian pengiriman tenaga kerja kembali diberlakukan Pemerintah Indonesia di bawah Pemerintahan Joko Widodo. Paska pertemuan bilateral dengan Malaysia pada Februari 2015, Presiden Joko Widodo dalam wawancara dengan media pada acara Munas II Partai Hanura, mengaku merasa malu saat membahas persoalan TKI dalam pembicaraan kedua negara. Melalui pernyataannya, Joko Widodo mengagendakan kebijakan tegas

penghentian pengiriman pekerja perempuan sebagai pekerja domestik *multitasking* dalam agenda *roadmap* Nol Penempatan PLRT 2017 yang sebelumnya telah diinisiasi dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2012. Komitmen Joko Widodo menjadi tindak lanjut dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya yang menghendaki penghentian pengiriman TKI bertahap dalam kurun 5 tahun.

“I have given Manpower Minister a target to come up with a clear roadmap on when we can stop sending female domestik workers. We should have pride and dignity. There are only three countries in the world supplying domestik workers, two are in Asia and one in Africa. One of those in Asia is Indonesia. This is a matter of dignity. It was really shameful (speaking about this) during our bilateral with Malaysia,” (Joko Widodo 2015 dalam Nazeer 2015)

Roadmap tersebut merujuk pada dua agenda utama yakni *hard policy* pengiriman TKI domestik ke Timur Tengah dan *soft policy* berupa pengetatan penempatan TKI ke negara-negara Asia Pasifik (Santosa 2015). Melalui Kepmenaker 260/2015, Pemerintahan Joko Widodo merealisasikan pemberlakuan kebijakan penghentian permanen penempatan TKI PLRT terhadap 19 negara kawasan Timur Tengah secara efektif per 1 Juli 2015 tepat setelah dieksekusinya 2 TKI di Arab Saudi (Presse 2015). TKI PLRT yang didominasi perempuan dalam kebijakan ini merujuk pada pekerja baru dan tidak berlaku bagi pekerja yang telah bekerja di Timur Tengah dan TKI dengan perpanjangan kontrak. Sementara negara-negara yang dikenai pembekuan pengiriman TKI meliputi Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhaikiri, pengiriman TKI akan dioptimalkan pada pekerja sektor formal serta mendorong spesifikasi pekerjaan domestik. Mengacu pada Kepmenaker nomor 1 tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh TKI, terdapat 7 jabatan yang dapat dimasuki oleh TKI pekerja domestik yakni *housekeeper*, *baby sitter*, *family cooker*, *caretaker*, *family driver*, *gardener*, dan *child care worker*, dengan kontrak kerja yang memuat uraian jabatan, uraian tugas, dan persyaratan TKI sesuai standar kompetensi setiap jabatan. Singkatnya, *roadmap* Nol Penempatan PLRT 2017 ditujukan sebagai upaya menghentikan eksportir tenaga kerja domestik dengan sistem kerja yang mencakup semua pekerjaan rumah.

Kebijakan penghentian pengiriman TKI bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya, bentuk penghentian pengiriman TKI seringkali menjadi pilihan kebijakan responsif atas permintaan asas tanggungjawab perlindungan TKI dari maraknya kasus kekerasan dan bentuk ketimpangan sistem hukum ketenagakerjaan. Di bawah instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penghentian pengiriman TKI sektor informal diberlakukan terhadap Arab Saudi per 1 Agustus 2011, efektif hingga ditandatanganinya kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) perlindungan TKI antara Indonesia-Arab Saudi dan terbentuk *joint task force* di antara keduanya. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk protes atas sikap kesewenangan pihak Arab Saudi dalam eksekusi hukuman pancung terhadap TKI PLRT Ruyati binti Satubi selaku terdakwa kasus pembunuhan terhadap majikannya dengan tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia sebelumnya. Bentuk *exit policy* penghentian pengiriman TKI sebelumnya juga diberlakukan terhadap Malaysia pada 26 Juni 2009, Kuwait pada 1 September 2009 serta Yordania terhitung sejak 30 Juli 2010 sebagai bentuk protes pemerintah Indonesia terkait sedikitnya upah yang ditetapkan dan tidak adanya bentuk perlindungan serius dari pemerintah setempat.

Secara umum, TKI berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah. Di tahun 2014, 32 persen TKI yang diberangkatkan merupakan lulusan sekolah dasar, 38 persen tamatan sekolah menengah pertama, dan hanya 25 persen menyelesaikan sekolah menengah atas (BNP2TKI 2014). Bagi TKI, berkerja di luar negeri merupakan upaya untuk mendapatkan upah perbulan yang lebih tinggi dua hingga tiga kali dari minimum pekerjaan serupa di dalam negeri. Melalui reguler remitansi yang dikirimkan, TKI telah mendukung ekonomi inklusi

daerah lokal. Dari penelitian oleh Bank Dunia terhadap dampak remitansi yang dihasilkan oleh TKI pada periode 2000-2007 menunjukkan fakta bahwa remitansi mendorong pengurangan angka kemiskinan (*poverty headcount*) sebesar 26,7 persen dan mengurangi angka kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) sebesar 55,3 persen. Remitansi juga meningkatkan pengeluaran marjinal pada konsumsi makanan sebesar 8,5 persen (Panturu & Uddarojat 2015). Terkait hal ini, remitansi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusi Indonesia yang dipahami sebagai basis pertumbuhan lintas sektoral terhadap kesempatan akses pasar dan sumber daya. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan remitansi telah mendukung kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah terhadap pelunasan biaya pendidikan, pembangunan perumahan, dan modal kewirausahaan di luar konsumsi kebutuhan pokok (Julianto 2017). Di tahun 2014, remitansi yang diterima mencapai hingga USD 8 milyar, merupakan besaran yang signifikan dibandingkan dengan total kapital masuk dari FDI dan bantuan luar negeri sebesar USD 28 milyar (Panturu & Uddarojat 2015). Remitansi dari Timur tengah dan Afrika mencapai USD 2,9 milyar sementara Asia Timur dan Pasifik mencapai USD 4,6 milyar.

Migrasi tenaga kerja domestik telah menjadi strategi pemerintah dalam mengatasi persoalan ketersediaan lapangan pekerjaan dalam negeri, namun, tidak adanya regulasi jelas dalam pekerjaan domestik seringkali mengakibatkan resistensi antara pekerja dan majikan. Kebijakan moratorium serentak sejatinya tidak serta merta disebabkan oleh kecenderungan kasus kekerasan dan lemahnya hukum perlindungan bagi tenaga kerja migran, terdapat alasan lain yang tidak menutup kemungkinan menjadi pertimbangan diambilnya keputusan tersebut. Merujuk pada pernyataan Joko Widodo yang melarang penempatan TKI perempuan sebagai PLRT migran atas pertimbangan akar masalah dan bentuk perendahan martabat bangsa, penulis memfokuskan penelitian ini pada lingkungan politik domestik Indonesia yang mendorong pemberlakuan kebijakan moratorium tersebut.

Merujuk pada pemahaman bahwa kebijakan luar negeri merupakan perpanjangan tangan politik dalam negeri, oleh sebab itu, politik domestik dapat dijadikan sebagai alat analisis kebijakan luar negeri negara (Fearon 1998, 289). Dinamika politik domestik sebagai penjelas kebijakan luar negeri menekankan pentingnya penerimaan agen-agen dalam negeri, hal ini berdasar pada poin penting terkait *survival* pembuat kebijakan. Sederhananya, bila kebijakan luar negeri tidak dapat diterima di ranah domestik maka kebijakan tersebut tidak dapat berhasil dalam lingkup internasional. Dalam hal ini, tuntutan dan aspirasi yang berkembang di ranah domestik menjadi sumber pertimbangan opsi politik luar negeri (Hussain 2011). Merujuk bahwa kebijakan ditengarai bukan hanya responsibel dan menjadi pilihan yang tepat terhadap dinamika politik yang ada, melainkan juga dituntut untuk *acceptable at home*. Bagaimana politik domestik mempengaruhi kebijakan luar negeri dijelaskan melalui premis awal yang menekankan bahwa pembuat kebijakan secara simultan mendapat tekanan dari politik domestik dan lingkungan internasional, atau disebut juga *nested game*. Di satu sisi, politik domestik digambarkan sebagai kompetisi kepentingan dalam lingkup institusi pemerintah. Sementara di lain sisi, merujuk pada krisis domestik dimana aktor secara agresif memanipulasi kebijakan luar negeri untuk menjaga posisi dari tekanan oposisi domestik. Sementara perihal yang menjadi motivasi aktor merujuk pada dua tujuan politik domestik yakni pembentukan koalisi dan upaya mempertahankan kekuasaan politik (Hagan 1995, 122). Koalisi domestik dibentuk untuk mendorong adanya dukungan terhadap usulan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan luar negeri menjadi hasil politik yang membutuhkan strategi politik dalam menyukseskan kebijakan. Sementara itu, terkait upaya mempertahankan kekuasaan politik, kebijakan luar negeri disesuaikan untuk meminimalisasi resiko domestik. Dalam hal ini, aktor yang berupaya mempertahankan kekuasaan politik akan menghadapi oposisi domestik, dan untuk mendapat legitimasi domestik maupun internasional aktor perlu mendorong adanya atensi public terhadap ranah kebijakan.

Untuk menyikapi oposisi domestik dalam dinamika politik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, terdapat tiga strategi alternative yang dapat dilakukan meliputi *accommodation*,

mobilization, dan *insulation* (Hagan 1995, 128). Terkait upaya pembentukan koalisi, strategi akomodasi mensyaratkan keterlibatan proses *bargaining* antar aktor sebagai kunci ratifikasi dan kesuksesan implementasi kebijakan. Aktor berupaya mengakomodasi oposisi dan mengokohkan kekuasaan politik melalui upaya menghindari publisitas sengketa kebijakan yang dapat memperlihatkan kelemahan negara dalam politik internasional. Melalui strategi akomodasi, aktor lebih memilih kebijakan yang memiliki resiko rendah dan menghindari perubahan-perubahan dalam kebijakan.

Strategi mobilisasi menitik beratkan pada adanya legitimasi rezim dan kebijakan pemerintah sebagai kunci *nested game*. Melalui strategi ini, aktor menekan pihak oposisi dengan menegaskan legitimasi yang dimiliki. Meskipun ditujukan untuk menekan oposisi, strategi mobilisasi juga tidak terlepas dari upaya pengarahan dukungan politik terhadap pemerintah dan kebijakan, atau setidaknya menjadi alat untuk mencegah menurunnya dukungan yang telah dimiliki. Mobilisasi seringkali berhubungan dengan motivasi aktor dalam mempertahankan kekuasaan melalui manipulasi kebijakan luar negeri. Aktor berupaya memperluas posisi mutual dalam politik domestik melalui beberapa cara: (1) menyeru terma nasionalisme dan imperialis, atau melempar isu yang memposisikan asing sebagai ancaman; (2) memperlihatkan kapabilitas aktor dalam menyelesaikan persoalan vital seperti memelihara keamanan nasional dan meningkatkan status internasional; (3) berupaya menghindari persoalan fragmentasi domestik. Sementara itu legitimasi politik juga menjadi strategi pembentukan koalisi politik. Aktor cenderung secara agresif menjual kebijakan, seringkali terhadap audien di luar rezim untuk meningkatkan dukungan politik selagi mendiskreditkan tekanan oposisi. Apapun strategi yang dilakukan, kebijakan luar negeri yang dipengaruhi cenderung bersifat kuat dan memaksa.

Strategi isolasi menekankan pada upaya penyekatan kebijakan luar negeri dari politik domestik meskipun di situasi hadirnya oposisi sekalipun. Dinamika ini menjelaskan bagaimana aktor berupaya membatasi aturan domestik dalam opsi-opsi kebijakan luar negeri. Strategi isolasi menakomodir berbagai perilaku seperti mengacuhkan tekanan oposisi, menekan lingkup oposisi secara penuh, atau memberi konsesi kepada oposisi pada isu kebijakan yang lain. Bila aktor memiliki preferensi kuat terkait kebijakan luar negeri, aktor akan cenderung mengesampingkan tekanan dari oposisi dan berharap bahwa kontroversi domestik dapat ditekan.

Menguatnya Sentimen Nasionalis Asertif dalam Kebijakan Indonesia

Corak nasionalisme asertif terlihat pada kebijakan-kebijakan Indonesia sejak periode Pemerintahan SBY, dan semakin menguat dalam kampanye pemilihan presiden 2014. Strategi mobilisasi pendukung dilakukan melalui isu-isu nasionalis yang mengarahkan posisi Indonesia sebagai negara yang mengalami ancaman insecurities. Pemahaman terhadap isu-isu nasionalis mendorong tumbuhnya sikap asertif Indonesia dalam pemenuhan kepentingan. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait isu-isu nasionalis merupakan bentuk dari sikap asertif yang ditujukan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih tegas dan tidak banyak kompromi. Kebijakan-kebijakan nasionalis asertif dipicu oleh pemahaman elit terhadap posisi Indonesia, yang dianggap melemah akibat adanya intervensi asing. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia memberikan banyak atensi terkait posisi Indonesia dalam politik bernegara. Konsekuensi munculnya pemahaman nasionalis asertif mendorong adanya reinterpretasi pokok kebijakan luar negeri bebas aktif yang lebih menekankan pada sikap tegas perihal pemenuhan kepentingan dan pertahanan kedaulatan.

Setidaknya terdapat dua corak yang menggambarkan sikap nasionalis asertif di Indonesia. *Pertama*, seruan emosional terkait ancaman asing. Diskursus kontemporer mengenai insecurities Indonesia oleh asing telah menjadi kepercayaan dalam elit politik. Posisi Indonesia yang terancam secara teritorial, penundukan pada sektor politik ekonomi dan

degradasi moralitas oleh konspirasi asing telah menjadi bagian umum dalam kebanyakan debat politik dan tidak jarang menghadirkan respon kemarahan (Aspinall 2015, 78). Era pemilihan presiden 2014, seruan emosional terhadap ancaman asing semakin memuncak dengan berbagai program kebijakan proteksionis yang ditawarkan oleh kandidat sebagai alat mobilisasi dukungan suara. Pada cakupan artian luas, pemahaman insecurities yang dialami elit politik merujuk pada tuntutan terhadap pemutusan belenggu eksploitasi ekonomi oleh asing, pembatasan porsi perusahaan asing terutama pada sektor-sektor sumber daya alam, serta mendorong peningkatan kapabilitas Indonesia secara militer dan budaya. Persepsi ancaman terhadap posisi Indonesia mendorong adanya kebijakan-kebijakan proteksionis terutama pada ranah-ranah vital (Conelly 2014).

Pada Oktober 2014, Mendagri mempertegas percepatan realisasi kebijakan pemekaran dua provinsi baru di Papua berdasar pada pendekatan isu strategis ancaman intervensi asing, gangguan pertahanan kedaulatan, serta secara jangka panjang ditujukan untuk memaksimalkan potensi daerah untuk mendorong kesejahteraan penduduk lokal. Sejak tahun 2010, banyak kebijakan pemerintah yang didesain sebagai respon dari ancaman insecurities asing. Penempatan angkatan bersenjata misalnya, yang dikonsentrasikan pada wilayah-wilayah rentan seperti perbatasan Indonesia-Malaysia dan kepulauan terdepan melalui mandat UU 29/2010 Kemendagri. Program-program bantuan internasional lebih diperketat di bawah kontrol pemerintah. Sementara ekspatriat juga dikenakan regulasi kompetensi bahasa Indonesia. Bukan menjadi hal yang mengejutkan, bahwa pada satu sisi ancaman asing selalu didefinisikan oleh nasionalis sebagai identitas yang bertolakbelakang dengan nilai-nilai yang dianut. Lantas corak nasionalis yang menekankan pada agresifitas asing pada konteks keamanan Indonesia menjadi pemahaman yang disproporsional, mengingat tidak ada negara yang secara lantang melakukan konfrontasi, sementara diskursus nasionalis terlampaui dini menyebut Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami serangan asing (Aspinall 2015, 78-9).

Kedua, kebutuhan terhadap pertahanan martabat bangsa. Istilah *national dignity* atau martabat bangsa menjadi terma yang mencirikan kebijakan di bawah Pemerintahan Joko Widodo. Sebagai sebuah kata kunci, debat politik dan arah kebijakan merujuk pada perhatian besar terhadap upaya mempertahankan citra Indonesia, dan mengutuk segala bentuk kekerasan, pencemaran, dan penurunan Indonesia oleh asing. (Aspinall 2015, 78-9) Obsesi terhadap martabat bangsa bukan hanya sebatas diskursus politis, melainkan pula mendorong terbentuknya kebijakan-kebijakan yang mencerminkan kebutuhan Indonesia untuk bersikap asertif pada kepentingan nasionalnya, termasuk menekan pada kebutuhan menempatkan diri secara kuat di hadapan negara lain.

Pada kasus eksekusi terpidana mati narkoba Bali Nine di awal Pemerintahan Joko Widodo, diskursus martabat bangsa hadir dalam komentar publik dan politisi, mendorong presiden untuk tetap tidak mengindahkan tekanan internasional yang mengutuk keras kebijakan eksekusi sebagai bentuk pertahanan terhadap martabat bangsa. Sorotan internasional terhadap kebijakan Indonesia terkait eksekusi, menebar ancaman memanasnya hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara asal terpidana mati, termasuk turunnya indeks hak asasi Indonesia pada level internasional (Utami 2015). Secara instan, segala bentuk problem hubungan Indonesia dengan negara lain diartikan dalam konteks kepercayaan politisi dan publik sebagai ujian terhadap kemampuan Indonesia untuk menegaskan dan mempertahankan martabatnya. Pada awal pemerintahan Joko Widodo, kebijakan dengan pertimbangan martabat bangsa diberlakukan pada penghentian pengiriman jeroan dan impor pakaian bekas.

Segala bentuk kebijakan yang lebih asertif menunjukkan adanya komitmen bagi Indonesia sendiri untuk dapat memegang peran yang lebih luas sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi beberapa tahun belakangan. Menguatnya sentimen nasionalis pada kampanye presiden 2014 memberikan pemahaman adanya insecurities pada martabat bangsa, hal ini mendorong perkembangan retorika pentingnya pertahanan kedaulatan nasional dan

perluasan peran sentral Indonesia dalam politik internasional. Sentimen nasionalis bukanlah perihai baru bagi Indonesia, sejak era Soekarno, terma nasionalis seringkali menjadi pilihan paling tepat untuk mobilisasi kepentingan politik terutama tercermin dalam agenda proteksi ekonomi, teritori, dan kultural seperti kebijakan *resource nationalism* dikenalkan dengan menargetkan kelompok bahan tambang melalui regulasi ekspor *smelter* dan pembatasan kepemilikan saham asing, legasi konfrontasi kedaulatan wilayah yang melibatkan Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia di Sipadan Ligitan (2002) dan blok minyak Ambalat, serta persoalan sentimen klaim budaya (Aspinall 2015, 74-5).

Bagi Indonesia, sejarah panjang kolonialisme memberi gambaran yang melekat pada proses pembelajaran hingga saat ini, melalui penjabaran arti penting penegakan nasionalisme perlawanan terhadap penjajah baik terminologi maupun simbolik yang menimbulkan sentimen anti terhadap segala bentuk penjajahan (Aspinall 2015, 76). Konsekuensi adanya pemahaman mengenai semangat juang dan revolusi kepemudaan yang berbasis gerakan anti kolonial secara simultan mempengaruhi pandangan tentang bagaimana seharusnya perilaku masyarakat saat ini. Meski telah menjadi pemahaman lama, penguatan sentimen nasionalis kontemporer lebih dicirikan kepada dua terma penting yakni seruan insekualitas asing dan kebutuhan pertahanan martabat bangsa. Disamping orientasi anti kolonial yang secara konsisten dipupuk melalui media pembelajaran, nasionalisme Indonesia seringkali dimanipulasi oleh pemimpin negara sebagai alat kepentingan kekuasaan. Di masa Soekarno, konfrontasi dengan Malaysia terkait pembentukan negara federasi merupakan hasil dari dorongan politik domestik yang dipengaruhi polarisasi kelompok partai komunis, militer, islam. Sama halnya dengan Soekarno, Soeharto menggiring sentimen nasionalis sebagai alat politik pengokohan rezim militeristik. Di era Joko Widodo, mobilisasi sentimen nasionalis semakin asertif, di sektor ekonomi, Joko Widodo berulang kali menekankan perlunya kreatifitas pemuda dalam bidang wirausaha untuk secara aktif bersaing dalam pasar domestik dan mencegah maraknya produk dari luar negeri.

Diskursus politik semakin didominasi oleh pernyataan bahwa Indonesia saat ini merupakan salah satu kekuatan utama dan sudah seharusnya melakukan penyesuaian perilaku. Banyak debat baik isu diplomatik maupun ekonomi turut disertai deklarasi pentingnya penguatan posisi Indonesia termasuk dengan tidak mudah mengalah pada tekanan luar negeri. Joko Widodo, secara instan menilai protes internasional terhadap eksekusi mati penyelundup narkoba bukan sebagai isu moral maupun legal, melainkan sebagai bentuk ujian keteguhan penegakan kedaulatan bangsa. Semakin tajam kritik yang menyayangkan perilaku Indonesia, semakin kuat keteguhan Joko Widodo pada pilihan satu-satunya untuk tidak berkompromi terkait persoalan martabat dan kedaulatan. Sama halnya dengan pemahaman profesor hukum internasional, Hikmahanto Juwana yang menyebut pentingnya komitmen Indonesia untuk memperlihatkan kepada negara lain, bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara yang dianggap mudah digertak dan didikte oleh kepentingan dan tekanan internasional (Jakarta Globe 2015).

Di bawah pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menjembatani politik demokratik terhadap kebijakan luar negeri melalui pendekatan yang berorientasi pada sektor domestik. Status *emerging economy* dan doktrin kedaulatan dan kepentingan nasional mendorong adanya sikap asertif yang tercermin pada absensi negosiasi pada perihai yang menyangkut harga diri bangsa, termasuk meningkatnya kepercayaan diri pada pilihan kebijakan yang lebih ambisius. Perilaku ambisius pemerintahan Joko Widodo dalam hal ini juga didukung oleh permintaan dari publik Indonesia (Juwana 2015). Konsekuensi pendekatan *pro-people* Joko Widodo dan peningkatan sentimen anti-asing mendorong adanya atensi kebijakan luar negeri yang disesuaikan pada cakupan pilihan kebijakan yang berimplikasi langsung pada publik sekaligus menunjukkan kapasitas kabinet pada kebijakan proteksionis (Parameswaran 2015).

Persepsi Elit Politik terhadap Pengiriman TKI

Paradoksial kebutuhan remitansi dan perlindungan TKI menjadi dilemma elit politik. Internasional Organisation for Migration (IOM) mengestimasi besaran remitansi TKI ke dalam negeri mencapai USD 7,8 milyar di tahun 2013. Besaran tersebut menyumbang sebagian besar capaian total GDP di tahun yang sama. Meskipun demikian, Indonesia masih dihadapkan pada situasi kemiskinan struktural. Berdasar Asian Development Bank (ADB), sekitar 45 juta dari keseluruhan 245 juta penduduk harus hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1,25 per hari. Hal ini tentu menjadi jurang pemisah yang sangat kontras terhadap rata-rata pertumbuhan impresif yang berada pada 5-6 persen per tahun. Konsekuensinya, migrasi tenaga kerja akan selalu diperjuangkan berdasar hak individual, sementara pemerintah dituntut untuk mengupayakan perluasan akses ketenagakerjaan. Sementara itu, unsur nasionalisme turut hadir dalam pembahasan. Kebijakan moratorium TKI bukan hanya persoalan yang berseberangan terhadap hak-hak pekerja, melainkan pula sebagai bentuk komitmen nasionalis pemerintah. Politisi nasionalis kerap mengkorelasikan TKI *unskilled* sebagai perih yang dapat merusak reputasi negara. Kelompok nasionalis ini berupaya menekan pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dan tegas dalam politik antar negara yang didukung dengan kapabilitas nasional dan capaian status negara *emerging* (Banu 2014). Seruan penghentian pengiriman TKI domestik menjadi salah satu pemahaman terkait penilaian martabat bangsa di kalangan elit politik.

Pada debat pemilu presiden 2014, calon wakil presiden Hatta Rajasa menegaskan keharusan pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman TKW atas dasar gangguan terhadap harkat dan martabat bangsa merujuk pada banyaknya kasus kekerasan dan eksploitasi tenaga kerja sektor domestik. Sebagai gantinya, intensifikasi pengiriman TKI terampil dilakukan agar dapat memiliki daya tawar tinggi terhadap tenaga kerja negara lain. Sementara untuk mendorong laju ekonomi, pengembangan usaha kecil dan koperasi dalam negeri disebut sebagai jalan potensial dalam mengurangi pengiriman TKI *unskilled* (Sholeh 2014). Sementara Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh menilai, permasalahan TKI bukan sekedar mencari solusi menjawab kurangnya penciptaan lapangan kerja, melainkan pula persoalan terkait harkat dan martabat bangsa Indonesia. Oleh karenanya, penegakan konstitusi terkait perlindungan TKI harus diupayakan oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini BNP2TKI. Merujuk pada adanya kasus pemerasan pada masa pra dan paska penempatan, BNP2TKI perlu menjalankan system pengawasan yang transparan, serta disosialisasikan kepada publik. Selain itu, basis perlindungan dapat didukung dengan pengembangan pemutakhiran data dan system pendataan yang akurat dan kredibel.

Anggota Komisi VIII DPR RI F-PDIP, Itet Tridjajati Sumariyanto juga menilai moratorium sebagai langkah kongkret. Menurut Itet, TKI PLRT selama ini kerap menjadi sumber masalah dan merendahkan martabat bangsa. Total pendapatan yang diterima TKI PLRT dinilai tidak sebanding dengan tanggungan beban psikologis dan kerentanan eksploitasi (Mulya 2015). Ketua Komisi IX DPR RI F-Demokrat, Dede Yusuf juga menekankan tuntutan moratorium TKI non formal kepada pemerintah sebagai langkah pertahanan martabat bangsa paska tayangnya iklan yang dinilai rasis dan melecehkan bangsa Indonesia (Berita Satu 2015). Tuntutan moratorium pengiriman TKI PLRT ditujukan pula untuk meningkatkan kompetensi dan penyidikan PJTKI. Kompetensi dinilai krusial mengingat pelecehan sering kali ditujukan pada TKI PLRT.

Keputusan moratorium TKI PLRT juga disebut Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid sebagai upaya menjaga harkat dan martabat bangsa, utamanya perempuan yang beresiko eksploitasi dalam sektor domestik. Pemerintah berupaya menekankan pengiriman TKI terampil yang dapat bekerja pada sektor-sektor publik. Beberapa cara dilakukan pemerintah untuk mendorong pengiriman TKI terampil salah satunya dengan melakukan persuasi secara langsung melalui sosialisasi dan penyuluhan pada kantong-kantong TKI. Sementara untuk mengatasi persoalan TKI non prosedural, pemerintah melakukan tindakan pencegahan pemberangkatan dengan memperketat jalur-jalur imigrasi utamanya di daerah perbatasan,

termasuk mengupayakan komunikasi dengan negara tetangga untuk mencegah tindak penyelundupan TKI ilegal (Berita Satu 2015). Paradoks kemiskinan dan nasionalisme dalam isu TKI telah mendorong pemerintah dalam dua posisi antara pengiriman TKI sebagai solusi persoalan kemiskinan structural dengan penempatan TKI sektor domestik yang kerap menjadi persoalan politis. Merujuk bahwa TKI turut merepresentasikan negara di luar negeri, maka persoalan eksploitasi dan penempatan tenaga kerja non prosedural menjadi pertimbangan terhadap penilaian martabat bangsa. Tanggapan elit politik terhadap TKI domestik sebagai sumber kesakitan martabat bangsa telah menjadi persepsi umum di kalangan elit, terutama elit nasionalis.

Dukungan Konstituen dan Oposisi terhadap Kebijakan Moratorium TKI

Lembaga Survei Indo Barometer merilis detail sebaran pemilih kandidat Prabowo dan Jokowi berdasar beberapa kategorial (Aco 2014). Dari kategori jenis kelamin, angka pendukung Jokowi-JK mencapai 46,7 persen berasal dari pendukung laki-laki. Sementara pendukung perempuan lebih unggul pada kisaran 53,2 persen. Berdasar kesukuan, dominasi sebaran pendukung Jokowi-JK berasal dari Madura (80 persen), Bugis (65 persen), dan Jawa (60 persen). Di wilayah Pulau Jawa, basis dukungan Jokowi-JK unggul mencapai 55,4 persen dari Prabowo-Hatta yang berhasil mendapat 33,8 persen dukungan. Ditilik dari persebaran dukungan berdasar provinsi, Jokowi-JK unggul mutlak di Jawa Tengah (68,1 persen), Jawa Timur (64,2 persen), Banten (50 persen), DKI Jakarta (48 persen), dan Sulawesi Selatan (67,5 persen).

Berdasarkan survei Indo Barometer, kantong dukungan Jokowi-JK terpusat pada kelompok masyarakat berpendidikan rendah. Suara Jokowi-JK unggul di kategori kelompok masyarakat yang belum dan tamat SD (57,3 persen), lulusan SMP (50,7 persen), dan tamat SMA (57,6 persen). Sementara pada kalangan yang pernah mengenyam perguruan tinggi, Jokowi-JK meraup dukungan sebesar 39,5 persen. Sebagian besar pendukung Jokowi-JK diidentifikasi berasal dari kalangan *wong cilik* dengan pendapatan per bulan paling besar mencapai 3 Juta Rupiah. Mayoritas dukungan suara bagi Jokowi-JK merupakan pemilih pemula yang masih berstatus pelajar (72,7 persen), petani (57,5 persen), sopir dan tukang ojek (54,5 persen), serta kalangan ibu rumah tangga (51,2 persen). Sementara basis dukungan Prabowo-Hatta mayoritas berasal dari kalangan pensiunan, pegawai swasta, dan PNS non guru. Untuk aspek dukungan dari desa-kota, defisit terbesar Prabowo-Hatta di daerah pedesaan mencapai 23 persen dari besaran dukungan Jokowi-JK. Sementara selisih dukungan Jokowi-JK terhadap Prabowo-Hatta di kota hanya sebesar 4 persen. Survei Indo Barometer secara keseluruhan menghasilkan elektabilitas Jokowi-JK (49,9 persen) unggul 13 persen dari pasangan Prabowo-Hatta (36,5 persen) dengan 13,5 persen memilih absen. Merujuk pada data rekapitulasi jumlah perolehan suara pada pilpres 2014, Jokowi-JK berhasil mengumpulkan balok suara sejumlah 364.257 (53,74 persen) pada dapil luar negeri. Di Hongkong, Jokowi-JK unggul dari Prabowo-Hatta dengan rincian 30,956 (74,26 persen) berbanding 10,728 (25,73 persen) suara (KPU 2014).

Dari kalangan tenaga kerja, sebanyak 500 TKI di Jawa Tengah memberikan dukungan terhadap pasangan Jokowi-JK. TKI yang mayoritas perempuan secara serentak menyatakan diri tergabung dalam Tim Pemenangan Pahlawan Devisa Jokowi-JK yang diadakan di kantor DPD PDIP Jawa Tengah pada 21 Juni 2014. Ketua APJATI Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono menyebut antusiasme dukungan TKI tersebut berdasar pada paradigma kepemimpinan Jokowi-JK yang dinilai pro rakyat (Rofiuddin 2014). Terkait upaya pemenangan Jokowi-JK, APJATI yang mewadahi 500 PJTKI memilih melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat sebagai langkah pengenalan visi misi Jokowi-JK. Sementara Jubir Jokowi-JK wilayah Jawa Barat, Waras Wasisto mengklaim bahwa seluruh TKI di luar negeri telah berkomitmen mengupayakan pemenangan Jokowi-JK seiring dengan kesiapan APJATI dalam mengkoordinir dukungan TKI bagi pasangan Jokowi-JK.

Dukungan terhadap pasangan Jokowi-JK juga nampak dari pernyataan Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah yang mengemukakan penilaian positif atas inisiatif pendekatan komprehensif dan realistis Jokowi-JK terkait persoalan TKI dalam debat pilpres pada 22 Juni 2014 (Indopolitika 2014). Deklarasi dukungan terhadap Jokowi-JK juga difasilitasi oleh relawan Jokowi-JK Pro TKI. Sekjen Jokowi-JK Pro TKI, Muhammad Miftah Farid, menyampaikan inisiasi deklarasi berawal dari keprihatinan kasus buruh migran yang tidak pernah usai, sementara Jokowi-JK dianggap mampu memberikan perlindungan maksimal, utamanya menilai bagaimana pengalaman JK pada kepemimpinan sebelumnya dalam menangani persoalan deportasi TKI di Malaysia dan menginisiasi pendidikan untuk calon TKI PLRT saat masih menjabat sebagai Menko Kesra (Tribun News 2014).

Pemahaman metode pendekatan pro rakyat juga menjadi salah satu pertimbangan antusiasme dukungan TKI terhadap Jokowi-JK. Sebagai calon yang berasal dari desa, dalam hal ini memiliki kesamaan terkait asal daerah, Jokowi dianggap memiliki etos kerja yang tinggi serta dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat bawah (Syahni 2014). Mobilisasi dukungan politik TKI juga diwadahi melalui pendekatan telekonferensi Jokowi-JK dengan TKI Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi. Telekonferensi tersebut selain ditujukan untuk mengenalkan visi misi dan program kerja pasangan calon juga sebagai media audiensi aspirasi TKI. Dengan target perolehan dukungan suara TKI hingga enam juta dari total tujuh juta keseluruhan TKI, pihak Jokowi-JK juga mengupayakan pembukaan komunikasi dengan perwakilan TKI di 19 negara guna menyukkseskan misi kemenangan tersebut.

Lembaga jajak pendapat Poltracking merilis hasil survei tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bulan keenam (Utama 2015). Sebanyak 48,5 persen narasumber menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil kerja sementara Kabinet Kerja Joko Widodo. Angka ketidakpuasan tersebut lebih rendah dibandingkan presentase narasumber yang menyatakan puas terhadap pemerintah yakni sebesar 44 persen. Dengan angka 44 persen, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menjadi capaian terendah dalam enam bulan masa kepemimpinan Jokowi-JK. Berdasarkan jajak pendapat terhadap 1200 responden, kekecewaan publik paling besar merujuk pada kinerja pemerintah di bidang ekonomi mencapai 52,2 persen, hal ini berdasar pada persoalan instabilitas dan fluktuasi harga bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, serta turunnya daya beli masyarakat akibat statisnya tingkat pengasilan. Survei Poltracking juga mencatat ketidakpuasan publik terhadap sector keamanan, hukum, dan upaya pemberantasan korupsi. Konflik domestik antar lembaga yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, merebaknya gerakan Negara Islam Irak dan Syiria, serta ketidakondusifan keamanan akibat adanya aksi kriminal menjadi isu yang memicu ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Dihadapkan pada situasi demikian, Pemerintahan Joko Widodo mengupayakan kebijakan yang dapat diterima dan didukung oleh publik sebagai upaya menaikkan tingkat kepercayaan publik dan mengokohkan pemerintahan. Merujuk pada strategi mobilisasi, pemerintahan Joko Widodo dapat melakukan manipulasi politik melalui kebijakan luar negeri yang tegas. Terkait hal tersebut, moratorium menjadi bahan mobilisasi dukungan baik respon penguatan kepercayaan publik maupun dukungan dari pihak oposisi. Beberapa respon dukungan dari DPD, LSM TKI sebagai konstituen Jokowi-JK di pemilu, dan partai oposisi pemerintahan penulis jabarkan untuk menunjukkan bagaimana pemerintah berhasil memobilisasi dukungan dalam mensukkseskan kebijakan.

Merespon kebijakan moratorium TKI ke Timur Tengah, DPD RI meminta pemerintah untuk melakukan usaha perbaikan serius dalam pengelolaan TKI, diantaranya dengan penguatan data dan sistem informasi, advokasi, maupun inventarisasi beragam permasalahan yang kemungkinan timbul untuk dapat segera dicarikan solusi terbaiknya (DPD 2015). Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad secara implisit mendukung moratorium dengan tindak lanjut

yang kongkret oleh pemerintah. Moratorium harus dipahami secara linear dengan langkah pemerintah dalam proses penguatan system ketenagakerjaan di luar negeri dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di negara-negara destinasi yang salah satunya dilakukan dengan intensifikasi persyaratan kompetensi melalui pembekalan baik keterampilan teknis maupun *soft skill*.

Dalam diskusi publik mengenai Kepmenaker Nomor 26 Tahun 2015 terkait penghentian pengiriman TKI sector informal ke Timur Tengah yang dilakukan Buruh Migran Indonesia Saudi Arabia (BMI-SA) menunjukkan respon beragam dari berbagai komponen WNI di Arab Saudi. Perwakilan PKS Hijaz sebagai partai oposisi, menyatakan sikap mendukung kebijakan pemerintah terkait moratorium. Sama halnya dengan PKS Hijaz, Gerindra Arab Saudi juga menentang praktek pengiriman kembali TKI domestik dan mendukung sepenuhnya kebijakan moratorium TKI sebagai bagian integral dari perlindungan dan perbaikan system migrasi tenaga kerja. Sementara dari pihak LSM, Ketua SPMI mendukung pemberlakuan moratorium oleh pemerintah merujuk pada upaya pembenahan perundangan perlindungan. Sependapat dengan SPMI, Ketua Umum Garda BMI Jeddah juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Dukungan adanya komitmen pemerintah dalam moratorium TKI PLRT juga diserukan oleh ketua GP Ansor Arab Saudi merujuk pada karakter social masyarakat Arab yang tertutup dan system perlindungan terkait buruh migran yang belum mendapatkan perhatian pemerintah Arab Saudi.

Agenda besar kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam nawacita menekankan pada 9 program prioritas, salah satunya upaya menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Penerjemahan agenda prioritas tersebut secara rinci nampak pada inisiatif kebijakan pemerintah salah satunya pada perlindungan TKI melalui sinergitas antar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Tingkat kepercayaan publik terhadap nawacita perlindungan TKI di awal pemerintahan Joko Widodo menjadi salah satu acuan bagaimana dukungan publik terkait kapasitas pemerintah dalam mensinergikan program kerja dengan inisiatif kebijakan. Survei Indopolling Network terkait tingkat harapan publik terhadap 9 agenda prioritas nawacita Joko Widodo memperlihatkan capaian 50-60 persen publik percaya terhadap komitmen pemerintah dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negaranya (Indopolling 2015). Terkait kerangka pemerintah dalam memberikan perlindungan TKI di luar negeri, sebesar 62,4 persen public mempercayai terwujudnya program tersebut, 13,9 persen public tidak percaya, dan 23,7 persen memilih tidak memberikan jawaban.

Terobosan kebijakan pemerintah dalam perlindungan TKI sesuai amanat nawacita diamanatkan pada berbagai kementerian dan lembaga, salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan. Kemenaker dalam hal ini berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI hal ini merujuk pada hak asasi terkait migrasi sementara negara wajib hadir dengan memberikan perlindungan bagi warga negara negaranya. Menurut Menaker, selama ini proses migrasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong tersebut seperti kemiskinan, keterbelakangan dan rendahnya tingkat pendidikan. Sedangkan faktor penarik seperti gaji yang lebih tinggi dan keinginan kerja di luar negeri. Merujuk pada perihal tersebut, migrasi TKI harus dimempertimbangkan dua sisi, baik remitansi maupun hukum perlindungan tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah tetap mengupayakan untuk memperluas kesempatan kerja di dalam negeri dan berkomitmen memfasilitasi tenaga kerja yang ingin bekerja di dalam maupun luar negeri. Untuk penempatan di luar negeri, pemerintah mengupayakan sistem pelaksanaan penempatan TKI yang terstruktur hingga ke desa (Disnakertrans Banten 2017). Terkait dengan inisiasi tersebut masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan penempatan TKI di luar negeri. Selain untuk meningkatkan pengawasan, hal tersebut juga bisa menjadi media informasi dan edukasi bagi calon TKI. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan insentif pelatihan kerja untuk mendorong kompetensi TKI.

Sementara program pemberdayaan kantong-kantong TKI dilakukan pula untuk mendorong kemandirian dalam pekerjaan.

SIMPULAN

Terdapat beberapa poin penting yang menjelaskan alasan pemberlakuan kebijakan moratorium. *Pertama*, politik domestik mempengaruhi perilaku negara dalam hal ini kebijakan luar negeri. Lingkungan politik pemerintahan menjadi poin penting yang patut dipertimbangkan. Lingkungan ini dapat berupa akseptabilitas dalam sistem domestik, konsensus, personaliti pembuat kebijakan, rasionalitas, dan pengaruh kelompok kepentingan. Merujuk pada akseptabilitas dalam lingkungan domestik, aktor berupaya memperluas posisi mutual melalui beberapa cara salah satunya seperti menyeru terma nasionalisme dan imperialis, atau melempar isu yang memposisikan asing sebagai ancaman. Sebagai konsekuensi berkembangnya corak nasionalis asertif yang ditandai dengan munculnya atensi terhadap insecurities oleh asing dan adanya kebutuhan pertahanan martabat bangsa mendorong adanya penerjemahan tuntutan tersebut dalam perilaku dan kebijakan Indonesia.

Kedua, persepsi elit politik Indonesia dipengaruhi oleh perihalan yang berkembang dalam lingkungan politik domestik. Perihalan tersebut merujuk pada narasi nasionalis asertif yang tengah menguat semenjak pemilu presiden tahun 2014. Isu nasionalis menjadi lahan strategi dukungan politik saat pilpres seperti yang diperlihatkan dari intensifikasi isu TKI dalam debat dan program kerja yang diusung kandidat pilpres 2014. Perihalan ini kemudian menjadi salah satu pendorong pemahaman nasionalis terkait pengiriman TKI PLRT yang dianggap elit politik sebagai bentuk penurunan martabat bangsa mengacu pada maraknya eksploitasi dan iklim perlindungan tenaga kerja yang belum maksimal.

Ketiga, kebijakan moratorium TKI PLRT ditujukan sebagai alat politik pemerintahan Joko Widodo untuk memobilisasi dukungan baik konstituen maupun dukungan dari pihak oposisi. Hal ini berdasarkan pada relasi kebijakan luar negeri dengan politik domestik. Adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada periode awal pemerintahan Jokowi-JK diperlihatkan dari survei menurunnya ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Ketidakpercayaan tersebut muncul akibat adanya isu-isu domestik seperti kasus Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, kenaikan harga barang pokok, ketidak kondusifan keamanan akibat meningkatnya kriminalitas, dan merebaknya gerakan Negara Islam Irak dan Syiria. Untuk itu, pemerintah memerlukan strategi untuk menguatkan kepercayaan publik. Melalui kebijakan proteksionis moratorium TKI, pemerintahan Joko Widodo dapat mengumpulkan dukungan publik.

Buku

Joe D., Hagan. "Domestic Political Explanations in the Analysis of Foreign Policy" in Laura Neack, Jeanne A.K. Hey & Patrick J. Haney, eds.. *Foreign Policy Analysis, Continuity and Change in Its Second Generation*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall, 1995.

Jurnal

Arianto A. Panturu, dan Rofi Uddarojat. "Mengurangi Beban Finansial TKI: Usulan Kebijakan untuk Pertumbuhan Inklusif dan Kemakmuran Pedesaan Indonesia." *Rekomendasi Kebijakan CIPS*. no. 1 (Juni 2015): hlm. 3. <https://www.neliti.com/publications/294/mengurangi-beban-finansial-tenaga-kerja-indonesia-tki-usulan-kebijakan-untuk-per>

Aspinall, Edward. "The New Nationalism in Indonesia," *Asia & the Pacific Policy Studies* 3, no. 1, (2015): hlm.78, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app5.111>

Connelly, Aaron. "Indonesian Foreign Policy under President Jokowi," *Lowy Institute Analysis*, (Oktober 2014),

https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/indonesian-foreign-policy-under-president-jokowi_0_0.pdf

Berita Online:

- Banu, Zarinu. "Indonesia's Domestic Workers in Legal Limbo," *Aljazeera*, 22 Feb 2014 <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/02/indonesia-domestik-workers-lega-201422054320743142.html>
- Beritasatu.com, "DPR: Stop Kirim TKI Non Formal ke Luar Negeri," *Beritasatu*, 5 Feb 2015, <http://sp.beritasatu.com/home/dpr-stop-kirim-tki-non-formal-ke-luar-negeri/77126>
- France-Presse, Agence. "Indonesia to stop sending domestik workers to Middle East." *The Guardian*, 5 Mei 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/may/05/indonesia-to-stop-sending-domestik-workers-to-middle-east-reports>.
- Hasanudin Aco, "Inilah Peta Kekuatan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2014," *Tribunnews*, 17 Juni 2014, <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/17/inilah-peta-kekuatan-jokowi-dan-prabowo-di-pilpres-2014>
- Indopolitika.com, "Konsep Perlindungan TKI Capres Jokowi Dinilai Lebih Komprehensif dan Realistis," *Indopolitika*, 23 Juni 2014 <https://indopolitika.com/konsep-perlindungan-tki-capres-jokowi-dinilai-lebih-komperhensif-dan-realistic/>
- Indopolling.co, "Menakar Harapan Publik terhadap Nawacita Jokowi-JK," *Indopolling*, 28 Feb 2015, <http://www.indopolling.co/menakar-harapan-publik-terhadap-nawacita-jokowi-jk/>
- Juwana, Hikmahanto. "Insight: Jokowi's foreign policy: Assertive or nationalistic?," *The Jakarta Post*, 25 Juni 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/25/insightjokowi-s-foreign-policy-assertive-or-nationalistic.html>
- Nazeer, Zubaidah. "Indonesia will stop sending its women to work as maids overseas, says Jokowi." *The Straits Times*, 14 Februari 2015, <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-will-stop-sending-its-women-to-work-as-maids-overseas-says-jokowi>
- Mulya, "DPR Dukung Langkah Presiden Stop Pengiriman TKI-PRT," *Harnas*, 26 Feb 2015 <http://www.harnas.co/2015/02/26/dpr-dukung-langkah-presiden-stop-pengiriman-tki-prt>
- Parameswaran, Prashanth. "Indonesia Defends its Foreign Policy Record under Jokowi," *The Diplomat*, 22 September 2015, <http://thediplomat.com/2015/09/indonesia-defends-its-foreignpolicy-record-under-jokowi/>
- Rofiuddin, "TKI Bentuk Pemenangan Pahlawan Devisa untuk Jokowi," *Tempo*, 22 Juni 2014 <https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/22/269587062/TKI-Bentuk-Pemenangan-Pahlawan-Devisa-untuk-Jokowi>
- Santosa, Uji Agung. "Pemerintah hentikan izin TKI ke 21 negara Timteng." *Kontan*, 4 Mei 2015, <http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-hentikan-izin-tki-ke-21-negara-timteng>.
- Sholeh, Mohammad. "Hatta: Ganggu Harkat dan Martabat Bangsa, TKW Harus Dimoratorium," *Merdeka*, 29 Juni 2014, <https://www.merdeka.com/peristiwa/hatta-ganggu-harkat-martabat-bangsa-tkw-harus-dimemoratorium.html>
- Syahni, Meidella. "6,5 Juta TKI Dukung Jokowi-JK," *Kompas*, 5 Juni 2014 <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/05/1709269/6.5.Juta.TKI.Dukung.Jokowi-JK>
- Virgiani Utami, Ranny. "SETARA: Eksekusi Mati Buat Indonesia dapat Nilai E dari PBB," *CNN Indonesia*, 27 April 2015, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150426151858-12-49292/setara-eksekusi-mati-buat-indonesia-dapat-nilai-e-dari-pbb/>

Artikel Online

Disnakertrans.bantenprov.go.id, “Perbaikan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan TKI,”
Disnakertrans Banten, 26 Jan 2017,
<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/read/berita/1175/Perbaikan-Tata-Kelola-Penempatan-dan-PerlindunganTKI.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

KPU. “Hasil Pilpres 2014,” *KPU,* [http://kpu.go.id/koleksigambar/PPWP -
Nasional Rekapitulasi 2014 - New - Final 2014 07 22.pdf](http://kpu.go.id/koleksigambar/PPWP-_Nasional_Rekapitulasi_2014_-_New_-_Final_2014_07_22.pdf)

Zain Hussain, Zaara. “*The Effect of Domestik Politics on Foreign Policy Decision Making*”, E-
International Relations Students, [http://www.e-ir.info/2011/02/07/the-effect-of-
domestik-politics-on-foreign-policy-decision-making/](http://www.e-ir.info/2011/02/07/the-effect-of-domestik-politics-on-foreign-policy-decision-making/)

